



IDENTITAS ISLAM DAN PENDIDIKAN DI ERA OTONOMI KHUSUS ACEH *ISLAMIC IDENTITY AND EDUCATION IN THE ERA OF ACEH SPECIAL AUTONOMY*

Amaliah Fitriah

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

e-mail: amaliahfitriah@gmail.com

Naskah Diterima: 24 Juni 2019; Direvisi: 15 Oktober 2019; Disetujui: 17 Maret 2020

Abstract

This article investigates education in the era of Aceh Special Autonomy from the perspective of Acehnese identity politics. The nature of education in Aceh was fundamentally a legacy of conflict, and an arena of continuous identity contestation in the course of Aceh history. This study focuses on the way the implementation of special autonomy and Islamic sharia has altered and reshaped the construction of Acehnese identity. The changes in the curriculum and the structure of education observed in this research has represented the reassertion of Islamic identity in the education of Aceh. However, this reassertion has not necessarily led to an all-Islamised education system in Aceh. Rather, this development has resulted in a hybrid education system, one which promotes a greater association and convergence between Aceh's distinct Islamic identity and the Indonesian education secular systems. This result emphasises that Acehnese identity has experienced transformation and negotiation, that is, although Islam has and continuously remained the most significant element of Acehnese identity, this identity is framed as part of Indonesian national identity. Therefore, identity is not fixed, but it is flexible and negotiable, as nationalism itself is a form of shared identity.

Keywords: *Autonomy; Decentralisation; Identity construction; Identity politics*

Abstrak

Artikel ini menginvestigasi pendidikan pada era Otonomi Khusus Aceh dalam perspektif politik identitas masyarakat Aceh. Hakikat pendidikan di Aceh merupakan warisan dari konflik dan senantiasa menjadi ajang kontestasi identitas dalam sejarah hubungan antara Aceh dan Jakarta. Tulisan ini akan melihat sejauh mana penerapan Otsus dan Syariat Islam telah membentuk atau mengubah konstruksi identitas Aceh. Perubahan-perubahan dalam kurikulum dan struktur pendidikan sebagaimana ditemukan dalam penelitian ini telah menegaskan kembali identitas Islam dalam pendidikan Aceh. Namun demikian hal ini tidak serta merta mendorong Islamisasi menyeluruh pada sistem pendidikan Aceh. Melainkan telah terbentuk sebuah sistem pendidikan 'hibrid' yang menghasilkan penyatuan dan konvergensi antara identitas Islam Aceh dengan sistem pendidikan sekuler Indonesia. Hasil penelitian ini meneguhkan argumen bahwa identitas Aceh telah mengalami transformasi dan negosiasi, meskipun Islam telah dan tetap menjadi elemen penting dalam identitas Aceh, namun identitas tersebut terus menerus ternegosiasikan ke dalam identitas nasional. Identitas bukan merupakan suatu yang tetap, melainkan fleksibel dan dapat dinegosiasikan, karena nasionalisme itu sendiri merupakan sebuah bentuk berbagi identitas.

Kata Kunci: Desentralisasi; Konstruksi identitas; Otonomi; Politik identitas

PENDAHULUAN

Artikel ini bertujuan untuk menginvestigasi persepsi masyarakat Aceh terhadap konstruksi identitas Aceh dalam bidang pendidikan. Dalam sejarahnya pendidikan telah menjadi sarana perjuangan Aceh melawan segala bentuk kolonialisme dan penindasan, dengan nilai identitas Islam mendasari perjuangan tersebut. Hal ini dapat dilihat melalui peran dayah dan ulama dalam perjuangan rakyat Aceh untuk melawan penjajahan Belanda. Ulama telah menjadi agen revolusi yang mendasari perjuangan dengan nilai Islam sebagai bahan bakarnya, perjuangan ini dikenal dengan hikayat Perang Sabil. Nilai-nilai identitas keislaman kemudian dinarasikan kembali dalam perjuangan untuk memisahkan diri dari Indonesia pada masa-masa setelah revolusi dan berlanjut pada masa awal perjuangan GAM melawan pemerintah Indonesia, meskipun pada akhirnya GAM merubah ideologi perjuangannya dari Islam menjadi nasionalisme etnis.

Sejarah telah membuktikan bahwa pendidikan di Aceh selama ini telah menjadi arena kontestasi antara identitas Aceh dan identitas ‘luar’ baik sejak jaman kolonialisme Belanda hingga masa kemerdekaan Indonesia. Kontestasi identitas tersebut tercermin dalam dikotomi antara pendidikan Islam dan sekuler. Dikotomi ini dimulai ketika Belanda mulai masuk ke Aceh dan memperkenalkan sistem pendidikan sekuler Barat. Masyarakat Aceh, dengan dipelopori oleh ulama-ulama dayah, menunjukkan resistensi terhadap pendidikan sekuler Belanda tersebut. Sehingga pendidikan Islam tradisional Aceh dayah dilihat sebagai representasi identitas Aceh, sedangkan pendidikan umum sebagai produk Barat. Dikotomi ini tetap berlanjut sampai masa kemerdekaan Indonesia. Dalam perkembangannya Aceh terus berusaha untuk menegakkan kembali pendidikan Islam tradisional Aceh melawan gempuran pendidikan sekuler dari luar.

Seiring dengan kebijakan desentralisasi dan menguatnya politik identitas, identitas lokal yang sebelumnya tidak mendapatkan tempat dalam rejim sentralisasi, kini menemukan kembali ruang eksistensinya. Desentralisasi telah memunculkan kembali sentimen-sentimen identitas lokal dan politik identitas yang

‘membahayakan’ kesetiaan warga terhadap negara (Lihat misalnya Aspinall & Fealy, 2003; Erb, Sulistiyanto, & Faucher, 2005; Robinson, 2011; Schulte Nordholt & Klinken, 2007). Ada kekhawatiran bahwa politik identitas dapat mengancam sikap nasionalisme dan pluralism (Zahrotunnimah, 2018). Di banyak Negara, desentralisasi telah menunjukkan gejala penguatan identitas lokal dan regional, meski tidak selamanya membahayakan konstruksi identitas nasional (Guibernau, 2006; Ichijo, 2012).

Paska Perjanjian Damai Helsinki 2005 (MoU Helsinki), Aceh memperoleh kekuasaan dan otonomi khusus untuk menentukan kembali bentuk sistem pendidikannya seiring dengan penerapan Syariat Islam. Dalam konteks ini, menjadi penting dan menarik untuk melihat apa arti kekhususan Aceh ini bila dikaitkan dengan pertarungan identitas yang terjadi di bidang pendidikan. Apakah kekhususan Aceh dengan sendirinya memberi keleluasan bagi Aceh untuk mendefinisikan atau menguatkan kembali identitas lokalnya? Apakah Otonomi khusus dengan sendirinya juga melemahkan identitas nasional? Bagaimana Aceh mengonstruksikan kembali identitasnya dalam pendidikan? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang akan dijawab dalam makalah ini.

KAJIAN PUSTAKA

Konstruksi Identitas Masyarakat Aceh

Secara historis, Aceh adalah entitas independen yang berbeda dari wilayah jajahan Belanda lainnya yang kemudian membentuk Republik Indonesia. Dibanding wilayah Indonesia lainnya, Aceh mengalami masa kemerdekaan yang lebih lama (Reid, 2006). Ketika Belanda pertama kalinya berusaha menjajah Aceh pada tahun 1873, barulah Aceh termotivasi untuk menjalin hubungan yang lebih kuat dengan wilayah jajahan Belanda lainnya (Aspinall & Berger, 2001). Ketika para tokoh nasionalis mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia di tahun 1945, Aceh setuju untuk bergabung dengan Indonesia yang baru. Namun, dalam perkembangannya GAM memiliki narasi lain, bahwa penyatuan Aceh ke dalam Indonesia oleh GAM dianggap sebagai transfer kedaulatan yang illegal dari penjajah lama, Belanda, kepada penjajah baru, Indonesia

(Hasan Tiro, 1984 dikutip dalam Miller, 2009). Namun perspektif ini banyak diragukan oleh ahli lainnya, mereka menganggap bahwa bergabungnya Aceh dan Indonesia merupakan sebuah kesukarelaan (Shah & Lopes Cardozo, 2014).

Secara sosial dan kultural, Aceh juga mengidentifikasi diri mereka berbeda dari wilayah Indonesia lainnya, dengan Islam dan budaya Timur Tengah lebih kuat membentuk identitas yang berbeda (Hillman, 2012). Identitas yang berbeda ini terutama dinarasikan secara intensif oleh GAM selama periode pemberontakan (1976-2005). Para aktifis GAM berusaha merekonstruksi identitas Aceh dengan menekankan pada homogenitas kultural historis ini. GAM bersikeras bahwa identitas Aceh secara fundamental berbeda dan tidak kompatibel dengan identitas Indonesia (Schröter, 2010). Sebagaimana diungkapkan oleh Hasan Tiro “Jalan menuju pembebasan Aceh adalah dengan cara menggugah kesadaran historis orang Aceh sebagai sebuah bangsa, sebuah budaya, dan agama” (Hasan Tiro, dikutip dalam Miller, 2009). Inilah yang dilihat sebagai konstruksi identitas Aceh yaitu sebuah kesatuan berdasarkan etnis, budaya, sejarah, dan agama, yang mendorong Aceh untuk memisahkan diri dari pemerintahan Indonesia. Dari uraian di atas dapat dikatakan orang Aceh melihat diri mereka sebagai sebuah entitas yang berbeda dari wilayah Indonesia lainnya yang dilandasi oleh ide Islam dan nasionalisme Aceh. Setidaknya inilah yang banyak dijadikan argumen oleh para ahli sebelum tercapainya perjanjian damai Helsinki pada tahun 2005.

Islam dan Politik Identitas Aceh

Konsep politik identitas dapat digunakan sebagai kaca mata dalam melihat kontestasi identitas di Aceh. Politik identitas didefinisikan sebagai politik pembeda, suatu kerangka politik yang memberikan batasan antara golongan kami dan golongan kalian, siapa yang akan disertakan (*included*) dan siapa yang akan ditinggalkan (*excluded*). Heller (sebagaimana dikutip dalam Haboddin 2012) mendefinisikan politik identitas sebagai sebuah gerakan politik yang fokus pada perbedaan sebagai kategori politik yang utama. Senada dengan Heller, Morowitz (1998) melihat politik

identitas sebagai sebuah garis tegas yang menentukan siapa yang akan diikuti dan siapa yang akan ditolak.

Dalam politik identitas simbol-simbol budaya, kesukuan, agama mendapat peranan penting. Reid (2010) membagi identitas budaya kedalam beberapa unsur pembeda, yaitu bahasa, agama, dan batas-batas kedaulatan. Namun demikian, Heller (2001) berargumen bahwa agama merupakan bangun identitas budaya yang paling kuat, sebagaimana kelompok suku dan warga kota yang dilengkapi dengan institusi politik dan diperkuat dengan praktik-praktik keagamaan. Dalam konteks Indonesia, politik identitas lebih terkait dengan etnisitas, agama, ideologi, dan kepentingan-kepentingan lokal yang diwakili umumnya oleh para elit politik (Maarif, 2012).

Simbol-simbol identitas yang dikonstruksikan ke dalam politik pembeda ini potensial digunakan sebagai klaim untuk memperoleh pengakuan politik (Gilbert, 2010). Dalam praktiknya, seringkali politik identitas dijadikan komoditi atau alat untuk menggerakkan politik lokal (Maarif, 2012), terlebih Indonesia sangat beragam dalam hal agama, etnisitas, dan kedaerahan sehingga politik identitas menjadi tidak terhindarkan (Romli, 2019). Dalam skala yang lebih intens politik identitas digunakan sebagai alat perjuangan untuk menggerakkan sentimen anti pusat dalam gerakan-gerakan separatisme seperti yang terjadi di Aceh.

Dalam sejarah Aceh, Islam merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari identitas dan budaya Aceh. Dengan kata lain, Islam merupakan penanda politik identitas masyarakat Aceh yang digunakan sebagai ideologi Aceh dan justifikasi utama bagi klaim atas kedaulatan Aceh. Meskipun elemen identitas lain seperti etnisitas dan sejarah juga kerap digunakan sebagai penanda identitas Aceh, namun tidak sekuat faktor identitas Islam.

Namun demikian, Islam sebagai *sense of identity* Aceh telah mengalami pasang surut dari waktu ke waktu. Islam menjadi justifikasi bagi perlawanan Aceh dalam masa Perang Aceh atau Perang Sabil (1873-1903) ketika Aceh berhadapan dengan Belanda yang dianggap kafir. Dalam masa perang kemerdekaan (1945-1949) Islam sempat menjadi faktor yang

menyatukan Aceh dan Indonesia dalam melawan Belanda dan sekutunya. Namun tidak diakomodirnya syariat Islam dalam dasar negara menjadi faktor kekecewaan masyarakat Aceh di bawah pimpinan Daud Bereuh untuk melakukan pemberontakan DI/TII terhadap Indonesia sekuler yang berlandaskan Pancasila. Setelah pemberontakan mereda, faktor ideologi Islam jugalah yang kemudian mendorong Aceh untuk menuntut status daerah istimewa pada tahun 1959 dengan keinginan untuk menerapkan syariat Islam dan sistem pendidikan Islam (Morris, 1983).

Dalam perjalanan pemberontakan GAM, ideologi perjuangan masyarakat Aceh mengalami transisi dari Islamisme menjadi etno-nasionalisme. Islam yang semula menjadi justifikasi utama untuk merdeka, kemudian tidak lagi menjadi argumentasi utama pemimpin Aceh untuk melepaskan diri dari pemerintah pusat. Menurut Aspinall (2007) para pemimpin Aceh mulai menanggalkan Islam sebagai konstruksi identitas Aceh yang berbeda dari Indonesia, dan mulai beralih pada konsepsi identitas yang didasarkan pada etnisitas (kesukuan), kejayaan dan kedaulatan historis. Para elit Aceh justru melihat Islam sebagai poin persamaan identitas dengan Indonesia sehingga sulit menjadi dasar klaim atas kedaulatan Aceh. Namun demikian, studi tentang keterlibatan perempuan Aceh dalam Pasukan Inong Bale, sayap militer GAM, menunjukkan bahwa Islam tetap menjadi faktor identitas utama yang mendorong masyarakat untuk melakukan perlawanan terhadap Indonesia, dan mendukung GAM (Rahmawati; Susilastuti; Mas'ood & Darwin, 2018).

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengasan kembali identitas Islam sepanjang sejarah Aceh dapat dilihat secara konsisten. Penerapan syariat Islam di Aceh merupakan bentuk paling nyata dari penegasan identitas Islam tersebut, karena syariat Islam menjadi identitas yang menawarkan cara hidup yang berbeda (Salim, 2004). Namun demikian, sebagian ahli berargumen bahwa penerapan syariat Islam lebih merupakan bentuk politisasi agama (lihat sebagai contoh Ichwan, 2007, 2011; Mawardi, 2003; dan Schumman, 1999) dan bukan merupakan sebuah kesadaran identitas. Menanggapi pendapat ini, Salim

(2004) berargumen bahwa penerapan syariat Islam tidak semata didorong oleh politisasi Islam, namun merupakan bentuk penegasan akan Islam sebagai identitas Aceh itu sendiri. Makalah ini akan melihat sejauh mana identitas Islam dalam perspektif masyarakat Aceh telah mewujud dalam pendidikan setelah penerapan Otsus dan syariat Islam.

Pendidikan sebagai Arena Kontestasi Identitas

Pendidikan merupakan suatu arena yang dapat menggambarkan bagaimana konstruk identitas Aceh bergerak dari masa ke masa, dengan elemen identitas Islam sebagai suatu kesatuan tak terpisahkan, meskipun sejarah dan etnisitas juga menjadi elemen penting lainnya dalam identitas Aceh. Sejarah pendidikan Aceh sejak masa kolonial Belanda yang ditandai dengan keberadaan dayah-dayah sebagai agen revolusi, sampai dengan Aceh modern setelah Aceh mengenal pendidikan Barat, menunjukkan kontestasi identitas yang berkelanjutan. Kontestasi tersebut terpusat pada dikotomi antara pendidikan Islam *indigenous* Aceh dengan pendidikan sekuler Barat. Merespon dikotomi ini, masyarakat Aceh dipimpin oleh para pemuka agamanya berusaha dan berjuang untuk menyatukan pendidikan agama dan sekuler. Namun demikian usaha ini memerlukan jalan yang panjang dan mengalami banyak tantangan.

Agama dan kelembagaan agama telah mengakar dalam pengorganisasian masyarakat di Aceh, termasuk dalam institusi Pendidikan. Sejak Islam masuk ke Aceh di abad 13, lembaga pendidikan *indigineous* di Aceh, dayah, telah memainkan peran penting dalam pendidikan masyarakat Aceh, terutama pengajaran tentang moralitas. Dayah-dayah ini umumnya dipimpin oleh ulama-ulama kharismatik yang menjadi panutan masyarakat. Peran dayah-dayah ini telah diakui sebagai pembawa peradaban dan reformasi masyarkat Aceh di masa-masa kejayaan kerajaan Islam di Aceh. Bahkan peran dayah melewati batas-batas Aceh, meliputi dunia Islam se Asia Tenggara (Husin, 2013). Pada saat awal kedatangan Belanda di Aceh pada Abad 15 dan 16, setiap area di kesultanan Aceh memiliki setidaknya satu dayah yang diasosiasikan dengan ulama pemimpinnya (Siegel, 2000). Pada masa kejayaan ini,

pendidikan di Aceh tidak memisahkan antara ilmu agama dan sekuler, dayah mengajarkan baik ilmu agama maupun ilmu umum secara terintegrasi sebagai sebuah kesatuan yang bersumber dari qur'an dan hadits. Namun demikian peran dayah semakin lama semakin terpinggirkan secara sistematis sejak diperkenalkannya sistem sekolah modern oleh Belanda pada awal Abad ke-20 sebagai bagian dari politik etis Belanda.

Pada masa awal penjajahan Belanda, mayoritas rakyat Aceh masih memilih untuk mengirim anak mereka ke dayah untuk memperoleh pendidikan, karena kurikulum sekolah umum yang didirikan oleh Belanda dianggap tidak sejalan dengan ajaran Islam dan siapa yang bersekolah di sekolah umum akan dianggap sebagai 'kafir'. Sejak itu, dayah dan para ulamanya menjadi simbol perlawanan terhadap penjajah kafir terutama melalui hikayat 'Perang Sabil' (Graf, Schröter, & Wieringa, 2010).

Untuk mengatasi resistensi masyarakat Aceh dan melemahkan peran dayah, Belanda berusaha memisahkan antara teologi dan pengetahuan umum dengan memperkenalkan strategi atau politik asosiasi yang digagas oleh Snouck Hugronje, seorang penasihat pemerintah Belanda untuk urusan Arab dan Pribumi. Strategi ini menekankan asosiasi antara budaya Islam dan budaya Barat. Strategi ini dianggap sebagai usaha untuk mengatasi '*the problem of Islam*' (Bloembergen & Jackson, 2006). Snouck menyarankan pemerintah Belanda untuk mengembangkan kebijakan Islam dengan memperlakukan Islam sebagai dua bagian berbeda: yaitu Islam sebagai agama dan Islam sebagai gerakan sosial politik (Benda, 1958). Terhadap Islam sebagai agama, Snouck menyarankan toleransi atau kebijakan yang netral terhadap kehidupan beragama masyarakat Aceh. Namun terhadap Islam sebagai sebuah gerakan sosial politik, dia menyarankan pendekatan yang tegas bahkan pendekatan militer untuk menghadapinya. Menurut Hugronje "Indonesia yang modern bukanlah Indonesia yang diatur oleh Islam atau adat, namun Indonesia yang ter-westernisasi" (Benda, 1958, p. 344). Nasihat Snouck ini lah yang berperan besar dalam kemenangan

Belanda, mengakhiri perang Aceh yang panjang.

Dalam menerapkan strategi asosiasi ini, pendidikan dianggap sebagai mekanisme yang paling ampuh untuk menyebarkan peradaban Barat. Penyebaran pendidikan sekuler melalui sistem sekolah modern dimaksudkan untuk memisahkan teologi dari pengetahuan umum untuk melemahkan gerakan-gerakan kemerdekaan rakyat Aceh, melalui pelemahan peran dayah. Pada akhirnya, Pendidikan Barat dianggap sebagai cara yang paling ampuh untuk mengalahkan pengaruh Islam di Indonesia (Benda, 1958). Di Aceh, strategi ini diwujudkan melalui pemisahan antara pengetahuan umum (sekolah) dan pengetahuan agama (dayah).

Disamping strategi asosiasi ini, Pemerintahan Kolonial Belanda juga menerapkan kebijakan Ordinansi Guru pada tahun 1905 untuk mengontrol pengajaran Islam. Peraturan ini mengharuskan semua guru agama teregistrasi untuk mendapatkan ijin mengajar atau berceramah (Abdullah, 2009; Kahin, 2005). Hal ini dimaksudkan untuk membatasi pergerakan para ulama yang dianggap sebagai penghalang oleh pemerintah Belanda.

Kedua kebijakan ini, strategi asosiasi dan ordinansi guru telah mempengaruhi sistem pendidikan Aceh, terutama Dayah, yaitu mendorong pada pemisahan antara pendidikan agama dan pendidikan sekuler dengan dikembangkan dua sistem pendidikan yang berbeda. Di satu sisi, Dayah dapat terus mengembangkan pengajaran agama, namun dilarang mengajarkan ilmu sekuler. Di sisi lain, Belanda mengembangkan sekolah modern untuk rakyat Aceh yang difokuskan pada pengajaran pendidikan sekuler. Inilah awal terjadinya dikotomi antara pendidikan agama dan sekuler di Aceh. Menurut Benda (1958), berkembangnya pendidikan sekuler Barat di tahun 1900an telah menyebabkan menurunnya pengaruh pendidikan Islam di Indonesia. Walaupun di awal pendirian *Volksschool* di tahun 1920an banyak ditentang oleh masyarakat pribumi, pada 1930 sekolah modern Belanda ini mulai diterima keberadaannya oleh masyarakat Aceh. Pada tahun 1935, masyarakat Aceh yang bersekolah di sekolah modern Belanda telah meningkat dua kali lipat dibanding tahun 1919

(Reid, 1979). Ini lah awal kemunduran pendidikan tradisional Aceh, khususnya dayah.

Hal ini menyadarkan rakyat Aceh akan pentingnya sistem Pendidikan Islam yang modern terutama di kalangan para ulama reformis. Maka ulama-ulama reformis ini mengembangkan sekolah Islam dengan sistem yang lebih modern, yaitu madrasah. Sekolah madrasah menggabungkan antara pengajaran agama seperti di Dayah, dengan metode pembelajaran modern seperti sekolah Belanda dengan sistem kelas (*grades*), ruang-ruang kelas dengan fasilitas meja-kursi, papan tulis, dan juga buku-buku yang komprehensif. Pada tahap berikutnya, madrasah-madrasah ini tidak hanya memodernkan organisasi dan metode belajarnya, namun juga mulai memasukkan kurikulum pendidikan sekuler dalam sistem pendidikan Islam. Menurut Siegel (2000) di awal pecahnya perang dunia ke-2 setengah dari mata pelajaran yang diajarkan di madrasah adalah mata pelajaran sekuler.

Hal ini menunjukkan adanya re-orientasi dalam pendidikan Islam di Aceh (Morris, 1983) yang bertujuan untuk melawan dominasi pendidikan Barat (Belanda). Hal ini juga menunjukkan munculnya kesadaran rakyat Aceh akan pentingnya pendidikan umum untuk menghadapi tantangan jaman. Kejayaan pendidikan Islam modern madrasah mencapai puncaknya dengan berdirinya Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) tahun 1939-1942 yang dipimpin oleh Daud Beureuh. Salah satu sumbangan terbesar PUSA dalam mereformasi pendidikan Aceh adalah standarisasi kurikulum madrasah dengan tujuan untuk mengurangi kesenjangan kualitas antara pendidikan madrasah dengan pendidikan Barat ala kolonial Belanda. Dalam standar kurikulum madrasah yang dikembangkan PUSA ditetapkan bahwa 30% untuk kurikulum sekuler dan 70% untuk kurikulum agama (Latif, 1992). PUSA juga untuk pertama kalinya mendirikan sekolah pendidikan guru di Aceh.

Pada masa kemerdekaan, peran PUSA dan madrasah mengalami penurunan dengan di'nasionalisasikan'nya madrasah, menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional dibawah Departemen Agama. Awalnya, madrasah-madrasah ini dinamakan Sekolah Islam Rakyat,

kemudian dikenal dengan Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) sampai saat ini. Ketika pada tahun 1953 PUSA terlibat dengan Pergerakan Daarul Islam (DI/TII) untuk mendirikan Negara Islam Indonesia dibawah pimpinan Teungku Daud Beureuh, peran madrasah semakin surut, karena para ulamanya terlibat konflik dengan pemerintah.

Pada saat pemerintah pusat menawarkan formula Daerah Istimewa untuk Aceh pada tahun 1959 untuk mengatasi pemberontakan DI/TII, salah satu tuntutan yang diajukan Aceh, selain penerapan syariat Islam, adalah penyatuan dua aliran pendidikan, yaitu pendidikan agama dan pendidikan sekuler (Morris, 1983). Namun permintaan Aceh ini tidak ditolak tetapi juga tidak ditindaklanjuti oleh Jakarta. Dualisme antara sekolah madrasah dan umum ini lah yang menjadi kekhawatiran para pemimpin Aceh. Mereka menginginkan integrasi antara kedua aliran pendidikan ini. Namun usaha penyatuan ini tidak dapat direalisasikan, karena manajemen dan pengelolaan kedua aliran pendidikan ini berada di bawah pemerintah pusat. Akhirnya usaha diarahkan pada integrasi kedua kurikulum, yaitu dengan menambahkan konten kurikulum agama di sekolah umum. Aceh mengusulkan formula 75:25 untuk sekolah umum, yaitu 75% kurikulum umum dan 25% kurikulum agama. Namun proposal ini juga tidak mendapat tanggapan yang memadai dari pemerintah pusat.

Masalah-masalah terkait peng-integrasian dua aliran pendidikan dalam skema Daerah Istimewa ini, yang tidak terselesaikan, merupakan salah satu kekecewaan masyarakat Aceh yang mendorong pada keinginan memisahkan diri (Miller, 2006). Kekalahan pendidikan agama ditandai ketika pada awal tahun 1970an jumlah sekolah umum dibawah Departemen Pendidikan telah jauh melewati jumlah madrasah di bawah Departemen Agama, 800 sekolah umum dan hanya 200 madrasah (Morris, 1983, p. 279). Hingga saat ini, jumlah sekolah umum di Aceh yang berada dibawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah jauh melampaui jumlah sekolah madrasah dan dayah di bawah Kementerian Agama (lihat Tabel 2).

Tabel 1. Institusi pendidikan Aceh

Sekolah Umum	Madrasah	Dayah	
		<i>Salafi</i>	<i>Terpadu/modern</i>
Di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (desentralisasi)	Di bawah Kementerian Agama (sentralisasi)	Independen (Swasta)	Swasta/ di bawah Kemendikbud/ di bawah Kemenag
Formal	Formal	Non-formal	Formal
Mengikuti sistem sekolah	Mengikuti sistem sekolah	Tidak mengikuti sistem sekolah	Kombinasi antara sistem dayah dan sistem sekolah
Kurikulum nasional	Kurikulum nasional dan kurikulum Islam	Terbatas pada studi Kitab Kuning	Studi Kitab Kuning dan kurikulum nasional

Tabel 2. Jumlah sekolah, madrasah, dan dayah serta persentase siswa di Provinsi Aceh

	Jumlah Sekolah (%)		% Siswa
Sekolah	4,904	(69%)	75
Dayah	1,031	(14%)	5
Madrasah	1,211	(17%)	20
Total	7,146	(100%)	100

Sumber: Penulis, diolah dari Aceh dalam Angka, Bappeda, 2013; Survey Dayah, BPPD, 2014 (tidak dipublikasikan)

METODOLOGI

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif selama empat bulan di dua kabupaten/kota di Provinsi Aceh yaitu Banda Aceh dan Bireuen. Dua lokasi ini dipilih dengan pertimbangan bahwa kedua lokasi tersebut merupakan representasi identitas lokal Aceh yang kuat. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah *Pairwise Ranking* (PWR), wawancara setengah terstruktur, dan analisis dokumen.

PWR adalah metode penyaringan (*screening*) terhadap isu yang penting untuk diteliti dalam rangka memetakan isu-isu terkait pendidikan paska otonomi daerah yang dianggap penting oleh responden. Pertanyaan yang diajukan dalam PWR adalah "Menurut anda apa saja isu-isu pendidikan yang terpenting dalam konteks otonomi daerah?" Setiap peserta diberikan tiga kartu kosong dan diminta untuk menulis jawaban mereka dalam kartu-kartu tersebut. Setelah itu mereka diminta untuk mengelompokkan jawaban-jawaban yang hampir sama sehingga terbentuk daftar kelompok-kelompok jawaban. Kegiatan ini

kemudian dilanjutkan dengan *me-ranking* kelompok jawaban tersebut berdasarkan tingkat 'penting' nya isu yang tertera, dari isu yang paling penting sampai isu yang tidak terlalu penting. Hasilnya adalah ranking isu-isu pendidikan setelah penerapan otonomi daerah berdasarkan persepsi responden

Empat sekolah menengah atas dipilih untuk melakukan PWR dari setiap kab/kota, Banda Aceh dan Bireuen, sehingga total terdapat delapan sekolah yang melaksanakan PWR (Tabel 3). Empat sekolah di setiap kabupaten/kota tersebut masing-masing terdiri dari dua sekolah umum, dan dua sekolah dayah. Antara lima sampai delapan anggota Komite Sekolah (KS) berpartisipasi dalam PWR di setiap sekolah tersebut. Dalam konteks desentralisasi pen-didikan, penting untuk membedakan antara sekolah umum dan dayah. Sekolah umum adalah sekolah yang berada di bawah kewenangan Dinas Pendidikan (Provinsi/ Kabupaten/Kota). Sedangkan dayah institusi pendidikan tradisional asli Aceh yang setelah Otonomi Khusus Aceh berada dibawah

kewenangan Badan Pembinaan Pendidikan Dayah (BPPD).¹

Wawancara setengah terstruktur dilakukan untuk mendalami temuan-temuan yang telah yang dihasilkan dari PWR. Metode ini dipilih karena memberikan keleluasaan dalam proses wawancara, sehingga peneliti dan responden dapat mengeksplorasi tema-tema baru yang muncul. Fleksibilitas, tidak terstruktur dan tidak baku, merupakan ciri penelitian kualitatif (Mason, 2002). Sampel dipilih dari

berbagai stakeholder pendidikan di Banda Aceh dan Bireuen yang terdiri dari Majelis Pendidikan Daerah (MPD), Dinas Pendidikan Provinsi dan Kab/Kota, Badan Pembinaan Pendidikan Dayah, Komite Sekolah (KS), dan Komunitas dayah (ulama dan teungku). Total keseluruhan sample adalah 32 yang meliputi 11 pegawai pemerintah daerah provinsi dan kab/kota (Dinas Pendidikan, MPD, BPPD), 11 anggota KS, 9 ulama dan teungku, dan satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.

Tabel 3. Partisipan *Pairwise Ranking*

Komite Sekolah	Banda Aceh		Bireuen	
Sekolah Umum (SMAN)	PWR 1	PWR 2	PWR 5	PWR 6
Dayah	PWR 3	PWR 4	PWR 7	PWR 8
Total	8 PWR			

Analisa Dokumen mengacu pada pengumpulan dan analisa dokumen tertulis baik dalam bentuk buku teks, arsip, dokumen kebijakan, catatan rapat, dan lain sebagainya. Dalam studi ini analisa dokumen difokuskan pada dokumen-dokumen yang diproduksi yang terkait dengan Otonomi Khusus Aceh, desentralisasi pendidikan, dan dokumen kebijakan pendidikan. Dokumen ini meliputi Perjanjian Helsinki 2005, UU Otonomi Khusus Aceh No. 18/2001, Undang Undang Pemerintahan Aceh 2006 (UUPA), peraturan-peraturan daerah lainnya terkait pendidikan (Qanun), dan artikel media lokal (cetak dan online). Dalam melihat konstruksi identitas Aceh dari masa ke masa, yang tidak kalah penting adalah literatur sejarah Aceh dan sejarah pendidikan Aceh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Otonomi Khusus, Syariat Islam, dan Kebijakan Pendidikan

Penerapan Otonomi Khusus Aceh dan Syariat Islam merupakan konsesi bagi penyelesaian konflik Aceh yang telah berlangsung selama lebih dari tiga dekade. Pemberian Otonomi Khusus juga tidak terlepas

dari konteks berakhirnya kekuasaan rejim Orde Baru dan lahirnya kebijakan desentralisasi atau otonomi daerah. UU No. 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Pasal 3 ayat 2 menetapkan empat bidang keistimewaan Aceh yang meliputi: a. penyelenggaraan kehidupan beragama; b. penyelenggaraan kehidupan adat; c. penyelenggaraan pendidikan; dan d. peran ulama dalam penetapan kebijakan Daerah (Sekretariat Negara, 1999). Kemudian pada tahun 2001, pemerintah pusat kembali mengeluarkan UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang memberikan hak kepada Aceh untuk mengontrol sumberdayanya melalui pembagian hasil sumber daya alam antara Pemerintah Provinsi Aceh dengan pemerintah pusat. Selain itu, undang-undang ini juga memberikan kewenangan kepada Pemerintah Aceh untuk menyusun peraturan daerah yang mengikuti prinsip syariat Islam.

Namun demikian, kedua undang-undang ini tidak dengan sendirinya menghentikan konflik sampai akhirnya terjadi bencana tsunami yang membawa Aceh dan

¹ Studi ini tidak memasukkan madrasah dalam desain penelitian, karena madrasah berada dibawah wewenang Kementerian Agama yang fungsinya tidak didesentralisasikan, sehingga madrasah masih

mempertahankan koordinasi secara vertikal dengan pemerintah pusat dan berada di luar kewenangan pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota.

Indonesia pada periode perundingan baru pada tahun 2005. Perundingan-perundingan ini menghasilkan kesepakatan antara Pemerintah Republik Indonesia dan GAM yang tercakup dalam Perjanjian Helsinki. Dari perjanjian tersebut lahirlah Undang-undang Pemerintahan Aceh (UUPA) 2006. Berbeda dari undang-undang otonomi yang telah ada sebelumnya (UU No. 44/1999 dan UU No. 18/2001), UUPA memberikan Aceh hak yang lebih luas dalam pemerintahan yang mencakup pemberian hak partisipasi politik bagi Aceh untuk membentuk partai lokal, dan partisipasi GAM dalam Pemilihan Kepala Daerah dan pemilihan anggota legislatif. Perundingan ini menjadi titik balik dalam hubungan antara Aceh dengan pemerintah Indonesia, dalam arti pemberian otonomi yang lebih luas untuk Aceh yang meliputi *self-government* atau pembentukan pemerintahan Aceh melalui pemilu lokal.

Selain kerangka pemerintahan *self-government*, pelaksanaan syariat Islam Aceh lebih dipertegas dalam UUPA ini yang tidak semata berupa kewajiban menjalankan syariat Islam di Aceh, namun meliputi pelebagaan nilai-nilai Islam dalam berbagai urusan, termasuk pendidikan. Penerapan syariat Islam telah memberikan konteks strategis berupa orientasi sosial-politik Islam yang menentukan dan memberi warna kebijakan pemerintah Aceh, baik provinsi maupun kabupaten/kota, termasuk di dalamnya kebijakan pendidikan.

UUPA menegaskan bahwa sistem pendidikan Aceh tetap merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional, namun dapat memasukkan nilai-nilai Islam berdasarkan Al Qur'an dan Hadits dan kearifan lokal Aceh yang meliputi nilai sosial-budaya Aceh. Pasal 216 UUPA ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa "(1) Setiap penduduk Aceh berhak mendapat pendidikan yang bermutu dan Islami sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. (2) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan berdasarkan atas prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai Islam, budaya, dan kemajemukan bangsa" (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2006). UUPA menyebutkan beberapa karakteristik pendidikan Aceh, yaitu keberadaan pendidikan dayah, peningkatan

fungsi Majelis Pendidikan Daerah (MPD), dan pembentukan kurikulum inti Aceh. Untuk memenuhi amanat UUPA ini, Qanun No. 5 Tahun 2008 pasal 15 ayat 2 memberi mandat bagi "Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota secara bersama-sama melaksanakan Keistimewaan Aceh dalam bidang pendidikan yang berkualitas serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan syari'at Islam" (Sekretariat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008). Dari perundangan dan peraturan yang ada, keistimewaan Aceh dalam bidang pendidikan dapat dipahami sebagai pengintegrasian syariat Islam dalam pendidikan Aceh melalui institusionalisasi nilai-nilai Islam dalam sistem pendidikan Aceh.

Identitas Islam dan Identitas Nasional dalam Pendidikan Aceh

Penelitian ini menemukan bahwa institusionalisasi nilai-nilai Islam sebagai representasi identitas Aceh telah tercermin dalam perubahan kurikulum dan struktur pendidikan Aceh paska penerapan Otsus. Pelebagaan nilai-nilai Islam ini terjadi melalui akomodasi nilai-nilai Islam dalam kurikulum Aceh. Selain itu institusionalisasi nilai Islam juga terlihat dalam integrasi dayah ke dalam sistem pendidikan Aceh secara formal melalui pembentukan Badan Pembinaan Pendidikan Dayah (BPPD). Dua hal ini menandai karakteristik khusus Aceh dalam bidang pendidikan. Namun demikian, studi ini menemukan bahwa institusionalisasi nilai Islam dalam sistem pendidikan Aceh juga dibarengi dengan penguatan kurikulum nasional (sekuler) pada dayah-dayah di Aceh. Bagaimana kedua perkembangan ini terjadi –Islamisasi Pendidikan Umum dan Sekulerisasi Dayah– dapat dilihat dalam temuan penelitian berikut ini.

Islamisasi Pendidikan Umum

Dalam konteks penelitian ini, Islamisasi diartikan sebagai penguatan atau penambahan muatan kurikulum agama Islam dalam sekolah-sekolah umum di Aceh, baik sekolah negeri maupun swasta. Dalam hasil PWR (Tabel 4) dan wawancara tentang isu-isu pendidikan di Aceh setelah penerapan Otsus terungkap bahwa pendidikan Islam merupakan isu yang sangat

penting dan menjadi perhatian masyarakat Aceh.

Menurut saya, isu yang paling penting untuk pendidikan Aceh di era Otsus adalah implementasi pendidikan Islam. Seperti kita lihat di Banda Aceh dengan penambahan 4 jam pelajaran agama, disamping 3 jam yg sudah dialokasikan dalam kurikulum nasional. (Orangtua Murid, Sekolah 1, Banda Aceh)

Setelah otonomi kami dapat mengharmonisasikan antara kurikulum

sekolah dan karakter Aceh, berdasarkan nilai-nilai Islam (Guru, Sekolah 2, banda Aceh)

Otonomi memberi kami kesempatan untuk mengembangkan kurikulum pendidikan Islam, sebagaimana disyaratkan oleh penerapan Syariat Islam (Guru, Sekolah 5, Bireuen)

Di Bireuen, kami diijinkan untuk mengembangkan silabus Kurikulum Karakter Islami di dalam kurikulum muatan lokal (Guru, Sekolah 6, Bireuen).

Tabel 4. Lima Ranking Isu Pendidikan Aceh dalam Konteks Otsus (Hasil Analisis 8 PWR)

Isu-isu Pendidikan	Ranking			Frekuensi	%
	1	2	3		
Pendidikan Islam	4	1	2	7	29
Pendanaan Pendidikan	3	2	2	7	29
Kualitas Pendidikan	-	3	3	6	25
Kurikulum Lokal	-	1	1	2	8
Manajemen	1	1	-	2	8
Total				24	99

(rounding error)

Perspektif tentang pentingnya pendidikan Islam di Aceh setelah penerapan Otsus diperkuat oleh temuan tentang kebijakan pendidikan daerah. Temuan penelitian di kota Banda Aceh dan Kabupaten Bireun menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah mengakomodasi syariat Islam dalam kebijakan pendidikan lokal, meskipun jenis kebijakan yang dilaksanakan di kedua kabupaten/kota ini berbeda.

Di Banda Aceh, Dinas Pendidikan Banda Aceh telah menjalankan program diniyah sejak tahun 2011. Program diniyah adalah program pendidikan Islam yang wajib diikuti oleh semua sekolah umum di Aceh, baik sekolah negeri maupun swasta. Program ini mewajibkan sekolah untuk menambah empat jam pelajaran agama per minggu selain tiga jam pelajaran agama yang dialokasikan dalam kurikulum nasional. Sehingga dengan demikian siswa sekolah umum di Aceh mendapatkan tujuh jam pelajaran agama per minggu dari yang sebelumnya hanya tiga jam.

Hal ini merupakan perubahan signifikan yang dimotori oleh Pemerintah Kota Banda Aceh dalam hal ini Dinas Pendidikan. Dinas

Pendidikan telah menyusun lima mata pelajaran yang diajarkan dalam program diniyah tersebut yaitu Fiqih, Akidah, Akhlaq, Qur'an-Hadits dan Sejarah Islam. Pemerintah Kota Banda Aceh juga mengalokasikan dana khusus untuk program ini dalam Anggaran Pendapatan Belanja Kota (APBK) Banda Aceh. Dana ini digunakan untuk membentuk tim yang bertugas untuk merekrut tenaga guru untuk program diniyah yang berlatar belakang teungku dayah atau universitas/perguruan tinggi Islam. Bukan hanya itu, Disdik Banda Aceh juga mengeluarkan sertifikat kelulusan untuk program diniyah ini dan menjadikannya sebagai syarat untuk melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah kota Banda Aceh dalam penguatan pendidikan Islam sebagai identitas lokal Aceh di sekolah-sekolah umum.

Program diniyah telah menjadi indikasi perubahan yang signifikan dalam kurikulum pendidikan Aceh. Pertama, program diniyah menunjukkan perubahan arah pendidikan Aceh dimana pendidikan umum semakin diarahkan untuk mendekati pendidikan agama. Kedua, program diniyah semakin mengaburkan

dikotomi antara pendidikan umum dan pendidikan agama yang selama ini selalu menjadi perdebatan dalam diskursus pendidikan di Aceh. Ketiga, program diniyah semakin mengaburkan batas antar aktor-aktor yang berperan dalam pendidikan di Aceh, yaitu antara teungku-teungku diniyah dan guru-guru di sekolah umum dengan keterlibatan teungku-teungku diniyah dalam merancang kurikulum di sekolah sekolah umum. Sebelumnya, peran teungku atau ulama dayah hanya terbatas dalam domain dayah atau pendidikan agama saja. Peran teungku dalam domain pendidikan umum sekarang semakin tampak nyata dalam mendesain program sekaligus sebagai guru dalam program tersebut. Bukan tidak mungkin hal yang sebaliknya juga terjadi di masa depan, yaitu terlibatnya guru-guru sekolah umum dalam pengajaran pengetahuan umum di dayah-dayah.

Sementara itu, kebijakan pendidikan Islam di Kabupaten Bireuen diimplementasikan dalam bentuk Peraturan Bupati tentang 'Kurikulum Karakter Islam'. Dinas Pendidikan Kabupaten Bireun menyusun silabus untuk 'Kurikulum Karakter Islami' dan mengeluarkan surat himbauan kepada sekolah-sekolah untuk menerapkan silabus ini. Namun demikian, peraturan ini tidak dibarengi dengan pengalokasian dana oleh pemerintah kabupaten Bireun untuk merealisasikan kurikulum ini (*wawancara ketua MPD Bireuen, Kadisdik Bireuen, dan guru sekolah negeri*). Sehingga tidak ada keseragaman di antara sekolah-sekolah di Bireun dalam mengimplementasikan program ini (*PWR 5 dan 6*). Pendanaan nampaknya menjadi kendala utama bagi sekolah dalam melaksanakan program ini. Pada umumnya, sekolah tidak memiliki dana khusus untuk merekrut guru yang dapat mengajarkan kurikulum ini. Untuk itu, sebagian sekolah memasukkan kurikulum pendidikan Islam ini dalam kegiatan ekstra kulikuler mereka atau dalam kurikulum muatan lokal dengan menggunakan sumberdaya guru yang sudah ada di sekolah (*wawancara guru sekolah 5 dan 6*).

Kebijakan pendidikan di kedua kab/kota ini sedikit banyak telah menunjukkan perubahan arah pendidikan Aceh menuju penguatan pendidikan Islam di sekolah umum. Namun demikian, data tentang perkembangan

kurikulum dan formalisasi pendidikan dayah memberikan perspektif lain tentang temuan ini.

Modernisasi Dayah

Berlawanan dengan temuan penguatan pendidikan Islam di sekolah-sekolah umum, temuan di dayah menunjukkan hal yang berbeda, Otsus telah membuka kesempatan untuk modernisasi dayah. Dalam penelitian ini, modernisasi dayah didefinisikan ke dalam dua hal, yaitu sekulerisasi kurikulum dayah dan modernisasi kelembagaan dayah. Sekulerisasi kurikulum dayah dapat diartikan sebagai transformasi dayah dari lembaga yang murni mengajarkan Kitab Kuning menjadi institusi pendidikan modern yang menggabungkan pengajaran agama Islam dengan kurikulum pendidikan sekuler. Sedangkan modernisasi kelembagaan dayah adalah integrasi dan formalisasi dayah ke dalam sistem pendidikan Aceh.

Modernisasi ini dipelopori oleh BPPD, sebuah lembaga yang dibentuk dalam skema Otsus sebagai respons terhadap tuntutan kekhususan Aceh dalam bidang pendidikan. Pembentukan BPPD ini merupakan bentuk pengakuan terhadap dayah sebagai representasi identitas lokal Aceh. Modernisasi dayah juga merupakan usaha pemerintah Aceh untuk memajukan pendidikan dayah yang selama ini dianggap tertinggal dan termarginalkan dibanding pendidikan umum (*wawancara dengan ketua BPPD Bireuen, staf BPPD Provinsi Aceh, dan ulama dayah*). Dengan integrasi dayah secara formal ke dalam sistem pendidikan Aceh, dayah dapat menjadi sejajar dengan lembaga pendidikan umum lainnya serta berhak atas pendanaan dari pemerintah.

Dayah harus mentransformasikan diri mereka untuk merespon dunia luar yang terus mengalami perubahan. Misalnya, dayah harus mulai menggunakan teknologi-teknologi modern dalam rangka untuk memajukan metode pengajaran di dayah. Namun demikian kita tidak boleh melupakan tradisi-tradisi yang selama ini berkembang di dayah (Wawancara, ulama dayah, Aceh Besar).

Salah satu metode BPPD untuk memodernisasi kurikulum dayah adalah dengan membuat standardisasi kurikulum inti dayah

(wawancara Ketua BPPD Bireuen). Dengan standardisasi ini, semua kurikulum inti dayah-dayah di Aceh menjadi seragam, dan dayah dapat memilih kurikulum tambahan sesuai dengan kebutuhan dayah dan konteks lokal, seperti: Bahasa Inggris, Keterampilan, Teknologi Informasi, dan Komputer. BPPD mendorong dayah-dayah tradisional (dayah salafi) untuk mengintegrasikan kurikulum sekuler (umum) ke dalam kurikulum dayah yang sebelumnya hanya terfokus pada pengkajian Kitab Kuning. Hal ini dilakukan dengan menambahkan subjek pelajaran umum ke dalam kurikulum dayah, atau dengan mendirikan sekolah umum di dalam dayah.

Dengan demikian, modernisasi kurikulum dayah merupakan bentuk revitalisasi atau rekonstruksi pendidikan Aceh dengan mengintegrasikan kurikulum agama dan sekuler dalam pendidikan dayah. Dengan integrasi kedua kurikulum ini, maka modernisasi dayah dianggap telah mengembalikan hakikat pendidikan dayah yang sejak sebelum masa penjajahan telah mengakomodasi pengetahuan umum kedalam pendidikan dayah.

Sejak pemerintahan kolonial Belanda pendidikan di dayah telah dikonstruksi untuk fokus pada pengajaran Kitab Kuning. Dayah telah terpenjara dalam sistem ini, padahal sebelumnya dayah menggunakan sistem terintegrasi yang mengajarkan kedua subjek: ilmu agama dan ilmu sekuler. Sekarang saatnya dayah melakukan revitalisasi, yaitu mengembalikan system pendidikan dayah yang mengintegrasikan kedua aliran ilmu pengetahuan tersebut (Wawancara, Kepala BPPD, Bireuen)

Sebelumnya, jika kita (pemerintah Aceh) berbicara tentang pentingnya pengetahuan umum di dayah, mereka (ulama dan santri) sangat menentang. Mereka masih beranggapan bahwa ilmu pengetahuan umum (sekuler) adalah 'kafir'. Sekarang sudah tidak lagi, mereka sudah dapat menerima program-program pemerintah untuk memodernisasi kurikulum dayah. Namun, masih ada sebagian kecil dayah yang menolak, mereka khawatir, jika dayah sibuk mempelajari pengetahuan umum,

suatu saat ilmu agama akan tertinggalkan (Wawancara, staf BPPD, Bireuen)

Pengembangan dayah secara kelembagaan juga merupakan salah satu perubahan yang terlihat dalam struktur pendidikan Aceh paska penerapan Otsus. Modernisasi dayah secara kelembagaan mencakup akomodasi dayah ke dalam sistem pendidikan Aceh dan formalisasi dayah. Dalam skema Otsus, Qanun No. 5/2008 (Sekretariat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008) telah mengakui dayah sebagai institusi pendidikan formal dalam sistem pendidikan Aceh, dimana sebelumnya dayah masuk ke dalam kategori pendidikan nonformal. Dengan demikian dayah berhak atas pendanaan dari pemerintah yang disalurkan oleh BPPD melalui mekanisme akreditasi dayah. Dayah yang telah terakreditasi dianggap telah memenuhi syarat untuk menjadi institusi pendidikan formal dan berhak atas pendanaan pemerintah seperti halnya sekolah umum lainnya. Meskipun pendanaan untuk dayah belum setara dengan pendanaan yang diperoleh sekolah umum, hal ini merupakan perubahan signifikan dalam hubungan antara dayah dan pemerintah. Dayah yang sebelumnya merupakan lembaga otonom, saat ini mulai menerima pendanaan dari pemerintah.

Secara historis, dayah adalah lembaga independen yang tidak tergantung pada pihak lain, termasuk pemerintah. Karakteristik otonom dayah ini utamanya terlihat dalam independensi dayah secara finansial. Umumnya dayah memperoleh pendapatan dari hasil pertanian atau peternakan, bisnis skala kecil-menengah, perdagangan dan sumbangan dari masyarakat (Suyanta, 2012). Dengan demikian, pemerintah Aceh tidak memiliki dasar otoritas untuk mengatur dayah yang otonom ini. Selain itu, otonomi dayah juga tercermin dalam keleluasan dayah dalam merancang kurikulum yang tidak harus mengikuti aturan pemerintah seperti sekolah umum.

Seperti Anda lihat, saat ini tidak ada lembaga pendidikan yang bisa bertahan tanpa dukungan dana dari pemerintah. Sekolah-sekolah bisa tutup jika tidak didukung dana pemerintah. Hanya dayah yang bisa bertahan tanpa dukungan dana

pemerintah (Wawancara, Ulama, Aceh Besar)

Tidak seperti lembaga pendidikan lainnya, Kami dayah memiliki keleluasan yang lebih dalam merancang kurikulum kami. Kami tidak harus mengikuti instruksi pemerintah. Itulah mengapa kurikulum dayah lebih bertahan, tidak seperti kurikulum pemerintah yang seringkali berubah-ubah. (Wawancara, Ulama, Aceh Besar)

Karakteristik lain dari dayah terepresentasi dalam prinsip yang dipegang teguh oleh dayah seperti prinsip non-profit, sukarela, kesederhanaan, solidaritas dan kebersamaan. Hal ini misalnya terlihat dalam praktik belajar mengajar di dayah yang didasarkan pada prinsip kesukarelaan dimana teungku dayah mengajar secara suka rela, tanpa gaji yang terstruktur seperti guru di sekolah umum. Jika ada insentif dari orang tua dan masyarakat sekitar untuk teungku dayah sifatnya adalah sumbangan dan tidak menentu, sehingga banyak teungku dayah yang memiliki pekerjaan di luar mengajar.

Dalam budaya dayah, meminta sumbangan misalnya dalam bentuk proposal dana dianggap sebagai hal yang memalukan dan tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Itulah mengapa dayah sangat enggan untuk meminta sumbangan dari luar komunitasnya. (Wawancara, Teungku, Banda Aceh)

Secara historis dayah itu mandiri, teungku dayah mengajar dengan semangat sukarela. Makanya jarang sekali kita melihat teungku dayah melakukan protes karena tidak memperoleh gaji, berbeda dengan di sekolah umum yang guru-gurunya sering melakukan protes karena gajinya belum dibayar. Teungku itu yakin, kalau mereka mengharapkan gaji, akan merusak keikhlasan mereka. (Wawancara, Pegawai BPPD Provinsi)

Karakteristik dayah yang otonom inilah yang membedakan dayah dari lembaga pendidikan lainnya di Aceh (Duhri, 2014; Suyanta, 2012). Namun demikian, modernisasi kelembagaan dayah serta pendanaan

pemerintah untuk dayah memberikan tantangan tersendiri bagi kemandirian dayah. Dayah yang sebelumnya berada di luar sistem pendidikan formal Aceh, setelah penerapan kebijakan Otsus terakomodasi dan terformalisasi ke dalam sistem pendidikan Aceh melalui program modernisasi dayah yang dipelopori oleh BPPD. Selain itu pendanaan resmi dari pemerintah kepada dayah yang disalurkan melalui BPPD menjadi tantangan bagi independensi finansial dayah.

Temuan ini menegaskan bahwa arah pendidikan tradisional Aceh yang tercermin dalam dayah mulai berubah, dari institusi yang murni mengajarkan kurikulum Islam menjadi institusi modern yang mengakomodasi identitas nasional yang tercermin dalam penggunaan kurikulum nasional dalam dayah.

Pendidikan Aceh Paska Otsus: Kontestasi atau Integrasi?

Faktor-faktor identitas seperti agama, budaya, bahasa, dan etnis seringkali menjadi pemicu yang mendorong daerah menuntut otonomi (Knight, 1982). Di banyak Negara, identitas merupakan faktor utama yang mendorong diterapkannya kebijakan desentralisasi atau otonomi, disamping faktor lain seperti ekonomi (Guinjoan & Rodon, 2014; Rodriguez-Pose & Sandall, 2008). Penerapan Otsus dan syariat Islam membuka kembali kesempatan bagi penguatan identitas Islam dalam pendidikan Aceh. Sejatinya identitas Islam inilah yang menjadi pendorong utama klaim atas kedulatan Aceh, dan kemudian tuntutan terhadap otonomi. Hal ini tidak menafikkan peran faktor identitas lain seperti kesukuan atau sejarah, namun identitas Islamlah yang secara konsisten dapat diamati sepanjang sejarah Aceh.

Dua temuan dalam penelitian ini Islamisasi pendidikan umum dan modernisasi dayah— menunjukkan telah terjadi penguatan identitas Islam dalam sekolah umum di Aceh, namun pada saat yang bersamaan juga terdapat pengembangan kurikulum umum (sekuler) di dayah.

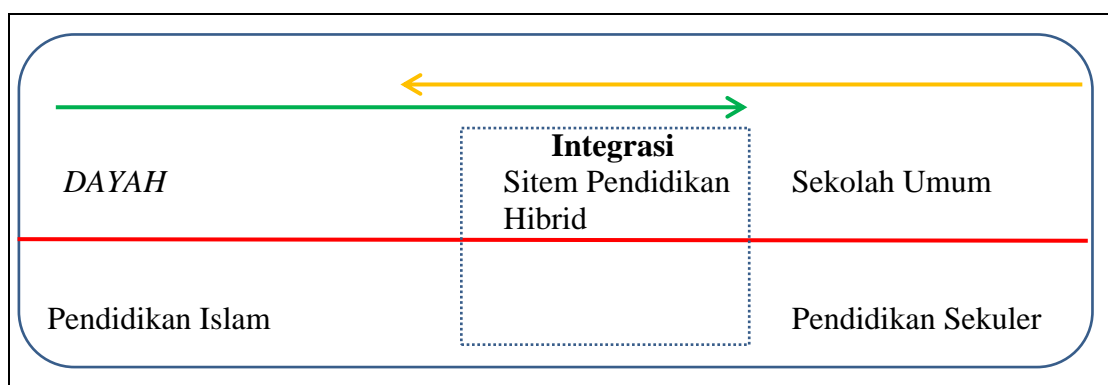
“Di satu sisi, pemerintah akan meningkatkan aspek pendidikan agama di sekolah-sekolah umum, untuk membuat pendidikan umum menyerupai dayah atau madrasah. Di sisi lain, mata pelajaran

sekuler juga akan ditambahkan ke dalam kurikulum di dayah” (Wawancara, Ketua BPPD Provinsi Aceh).

“Sekarang di Aceh kita tidak dapat benar-benar membedakan antara sekolah Islam dan sekolah umum. Mata pelajaran yang diajarkan di kedua sekolah tersebut sudah hampir sama” (Wawancara, Ulama, Bireuen).

Di satu sisi telah terjadi penguatan kurikulum pendidikan Islam di sekolah-sekolah umum di Aceh. Hal ini diungkapkan dengan istilah ‘menyantrikan sekolah’, yang berarti membuat kurikulum sekolah umum menjadi lebih Islami (Wawancara Ulama di Banda Aceh, Pegawai BPPD Provinsi Aceh, Ketua BPPD Kabupaten Bireuen). Di sisi lain, sebaliknya, telah terjadi penguatan pendidikan sekuler di dayah-dayah yang dikenal dengan istilah ‘modernisasi dayah’. Hal ini diilustrasikan dengan ungkapan ‘menyekolahkan santri’ atau menguatkan kurikulum pendidikan sekuler di dalam dayah (Wawancara Ketua BPPD Bireuen, pegawai BPPD Bireuen, pegawai BPPD Provinsi Aceh, dan ulama di Bireuen).

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, peneliti berargumen bahwa penerapan syariat Islam tidak serta merta menjadikan pendidikan Aceh memiliki kecendrungan satu arah menuju ‘Islamisasi’ yang berlebihan. Perubahan di dalam sistem pendidikan Aceh justru menunjukkan konvergensi antara pendidikan Islam dan pendidikan umum (Gambar 1). Benar bahwa telah terlihat indikasi penguatan kurikulum Islam di sekolah-sekolah umum di Aceh, namun hal ini dibarengi dengan modernisasi di dalam pendidikan tradisional dayah. Sehingga dapat dikatakan bahwa meskipun Otsus dan penerapan syariat Islam telah mempromosikan pendidikan yang memuat nilai-nilai Islami, hal ini tidak menjadikan pendidikan Aceh tertutup dari nilai-nilai lain. Sebaliknya pendidikan Aceh semakin terbuka terhadap interpretasi baru, yaitu pendidikan yang mengadopsi nilai-nilai Islam dan sekaligus menerima interpretasi modern terhadap nilai Islam yang menekankan pada pentingnya pengetahuan umum-sekuler dalam pendidikan Aceh. Dengan demikian Aceh telah membentuk sebuah sistem pendidikan ‘hibrid’ yang mendorong pada penyatuan dan konvergensi antara sistem pendidikan Islam versi Aceh dengan sistem pendidikan sekuler.



Gambar 1. Arah perkembangan pendidikan Aceh dalam konteks Otsus

Perkembangan yang terjadi dalam pendidikan Aceh ini telah menjawab salah satu persoalan yang selama ini menjadi sumber perdebatan, yaitu adanya dikotomi antara pendidikan umum dan pendidikan agama dalam sistem pendidikan Aceh. Dikotomi yang selama ini telah menimbulkan pemisahan dalam ide-ide pengembangan pendidikan, dimana sekolah umum dianggap sebagai tanggung jawab pemerintah Aceh, dan dayah adalah lembaga otonom yang tidak bersinggungan dengan pemerintah. Aceh telah memanfaatkan Otonomi

Khusus dan Syariat Islam sebagai sarana penyatuan kembali dua aliran pendidikan di Aceh. Namun sistem pendidikan hibrid yang dihasilkan menunjukkan bahwa masih ada kontrol pemerintah pusat dalam sistem pendidikan Aceh. Sehingga penguatan identitas Aceh melalui institusionalisasi nilai Islam dalam sistem pendidikan, tidak serta merta bertentangan dengan konstruksi identitas nasional Indonesia.

Islam telah memainkan peran penting dalam politik identitas Aceh, yang memberikan justifikasi bagi perjuangan Aceh sebagai sebuah entitas untuk memperoleh kedaulatan, dan pada akhirnya memperoleh otonomi khusus (Lihat Gilbert, 2010). Dalam praktiknya, Islam sebagai sebuah identitas politik seringkali dijadikan sebagai komoditi atau alat untuk menggerakkan politik lokal (Maarif, 2012), sebagaimana Islam pernah digunakan sebagai ideologi perjuangan separatisme di Aceh, namun kemudian digantikan oleh ideologi etnonasionalisme (Aspinall, 2007). Penerapan syariat Islam di Aceh sebagai wujud nyata dari penegasan identitas Islam pun tidak terlepas dari argumen politisasi identitas untuk kepentingan sekelompok elit, baik elit lokal maupun elit nasional (Lihat misalnya Ichwan, 2007, 2011). Namun, studi ini menunjukkan bahwa penerapan syariat Islam tidak semata didorong oleh politisasi Islam, namun merupakan bentuk penegasan akan Islam sebagai identitas Aceh itu sendiri. Hal ini terlihat dalam perspektif masyarakat Aceh tentang pentingnya penguatan identitas Islam dalam pendidikan Aceh. Otonomi sebagai sebuah konsesi politik atas tuntutan kemerdekaan Aceh telah memberikan kesempatan kepada Aceh untuk merekonstruksikan kembali identitasnya dengan cara bernegosiasi dengan pemerintah pusat untuk menerapkan pendidikan Islam yang integral, suatu hal yang sebelumnya sulit untuk diterapkan. Integrasi antara identitas Aceh dan identitas nasional dalam pendidikan Aceh menunjukkan bahwa identitas merupakan sesuatu yang cair, yang dapat didefinisikan ulang tergantung pada konteks dan aktor yang mendefinisikan identitas tersebut. Identitas menjadi politis ketika didefinisikan oleh para elite, namun identitas menjadi lebih mengakar dan terlembaga ketika didefinisikan oleh masyarakat akar rumput, karena identitas sejatinya adalah sebuah keseharian masyarakat itu sendiri.

PENUTUP

Peran Islam dalam konstruksi identitas Aceh tidak terbantahkan sebagaimana terangkum dalam literatur sejarah Aceh. Dalam beberapa babak sejarah Aceh, Islam telah menjadi faktor pembeda dalam politik identitas

Aceh, Islam dijadikan sebagai argumen utama atas klaim terhadap pengakuan politik dan kedaulatan Aceh. Islam juga menjadi salah satu pendorong atas tuntutan otonomi disamping faktor lain seperti distribusi sumberdaya alam (ekonomi). Meskipun elit Aceh berusaha untuk melakukan konstruksi ulang atas identitas Aceh dengan menyertakan elemen identitas lain berupa sejarah dan kesukuan Aceh (etnonasionalisme), namun di tingkat akar rumput, Islam tetap menjadi elemen identitas yang paling signifikan yang membentuk *sense of identity* masyarakat Aceh, seperti terlihat dalam perkembangan pendidikan di era Otsus dalam penelitian ini. Dengan demikian penelitian ini menegaskan bahwa Islam tidak semata menjadi alat politik untuk memperoleh legitimasi, namun Islam juga merupakan bentuk identitas Aceh itu sendiri yang mengakar dalam masyarakat Aceh. Islam masih dan terus menjadi elemen utama dalam konstruksi identitas Aceh.

Meskipun demikian, konstruksi identitas Islam Aceh telah mengalami transformasi, dari Islam sebagai identitas pembeda menjadi Islam yang terintegrasi dan menjadi bagian dari identitas nasional. Inilah bentuk pendefinisian ulang identitas Aceh yang didasari oleh pemahaman Islam yang modern, sebuah revitalisasi identitas Islam Aceh menjadi identitas yang semakin fleksibel dan terus menerus dinegosiasikan. Untuk itu pemerintah hendaknya tidak memandang penguatan identitas Islam dalam konteks Otsus Aceh dan penerapan syariat Islam sebagai sebuah ancaman terhadap identitas nasional, karena identitas nasional tidaklah seragam, tetapi merupakan pengakuan akan perbedaan terhadap identitas-identitas yang tergabung di dalamnya.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi pada penelitian ini. Pertama, penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh partisipan yang terlibat dalam studi ini yaitu para guru dan orang tua di sekolah sampel pada Kota Banda Aceh dan Kabupaten Bireuen, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh, Kepala Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bireun, Ketua Majelis Pendidikan Daerah

(MPD) Provinsi Aceh, Ketua MPD Kabupaten Bireuen, Kepala Badan Pembinaan Pendidikan Dayah (BPPD) Kabupaten Bireun, dan pegawai BPPD Provinsi Aceh. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Direktur ICAIOS (*The International Centre for Aceh and Indian Ocean Studies*) Universitas Syah Kuala yang telah menyediakan perpustakaan sebagai sumber bagi penulis untuk memperoleh literatur Aceh. Terakhir penulis mengucapkan terimakasih kepada New Zealand Aid (NZ Aid) yang telah menjadi sponsor bagi penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, T. (2009). *Schools and Politics: The Kaum Muda Movement in West Sumatra (1927-1933)*: Equinox Publishing.
- Aspinall, E. (2007), 'From Islamism to nationalism in Aceh, Indonesia', *Nations and Nationalism* 13 (2), 245–263.
- Aspinall, Edward, & Berger, Mark T. (2001). The break-up of Indonesia? Nationalism after decolonisation and the limits of the nation-state in post-cold war Southeast Asia. (Special Issue: The Post-Cold War Predicament). *Third World Quarterly*, 22(6), 1003-1024.
- Aspinall, Edward, & Fealy, Greg. (2003). *Local power and politics in Indonesia : decentralisation & democratisation*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Benda, Harry J. (1958). Christiaan Snouck Hurgronje and the foundations of Dutch Islamic policy in Indonesia. *The Journal of Modern History*, 30(4), 338-347.
- Bloembergen, M., & Jackson, B. (2006). *Colonial Spectacles: The Netherlands and the Dutch East Indies at the World Exhibitions, 1880-1931*: Singapore University Press.
- Dhuhri, Saifuddin. (2014). *Dayah: menapaki jejak pendidikan warisan endatu Aceh*. Banda Aceh: Lhee Sagoe Press.
- Diprose, Rachael. (2009). Decentralization, horizontal inequalities and conflict management in Indonesia. *Ethnopolitics*, 8(1), 107-134. doi: 10.1080/17449050902738804
- Erb, Maribeth, Sulistiyanto, Priyambudi, & Faucher, Carole. (2005). *Regionalism in post-Suharto Indonesia* (1st ed.). New York: Routledge Curzon.
- Gilbert, Paul. (2010). *Cultural Identity and Political Ethics*. Edinburgh University Press Ltd.
- Graf, Arndt, Schröter, Susanne, & Wieringa, Edwin Paul. (2010). *Aceh : history, politics, and culture / edited by Arndt Graf, Susanne Schröter, Edwin Wieringa*: Singapore : Institute of Southeast Asian Studies, 2010.
- Guibernau, Montserrat. (2006). National identity, devolution and secession in Canada, Britain and Spain. *Nations and Nationalism*, 12(1), 51-76. doi: 10.1111/j.1469-8129.2005.00230.x
- Guinjoan, Marc, & Rodon, Toni. (2014). Beyond identities: Political determinants of support for decentralization in contemporary Spain. *Regional & Federal Studies*, 24(1), 21-41. doi: 10.1080/13597566.2013.818980
- Haboddin, M. (2012). *Revitalisasi Politik Identitas di Indonesia*. Yogyakarta: Kaukaba.
- Heller, A. (2001). Cultural Memory, Identity and Civil Society, *Internationale Politik und Gesellschaft* 2, 139-143. Publicada por la Fundación Friedrich Ebert.
- Hillman, Ben. (2012). Power-sharing and political party engineering in conflict-prone societies: the Indonesian experiment in Aceh. *Conflict, Security & Development*, 12(2), 149-169. doi: 10.1080/14678802.2012.688291
- Husin, Asna. (2013). Leadership and authority: Women leading dayah in Aceh. In B. J. Smith & M. R. Woodward (Eds.), *Gender and power in Indonesian Islam: Leaders, feminists, Sufis and pesantren selves* (pp. 49-65). New York: Routledge.

- Ichijo, Atsuko. (2012). Entrenchment of unionist nationalism: Devolution and the discourse of national identity in Scotland. *National Identities*, 14(1), 23-37. doi: 10.1080/14608944.2012.657079
- Ichwan, M. N. (2007). The politics of shari'atisation: Central governmental and regional discourses of shari'at implementation in Aceh. *Islamic Law in Modern Indonesia*. Harvard: Islamic Legal Studies Program
- Ichwan, M. N. (2011). Official ulema and the politics of re-Islamization: The Majelis Permusyawaratan Ulama, shari'atization and contested authority in Post-New Order Aceh. *Journal of Islamic Studies*, 22(2), 183-214.
- Kahin, A.R. (2005). *Dari pemberontakan ke integrasi Sumatra Barat dan politik Indonesia, 1926-1998*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2006). Undang-undang Pemerintahan Aceh (UUPA).
- Knight, D. B. (1982). Identity and territory: geographical perspectives on nationalism and regionalism. *Annals - Association of American Geographers*, 72(4), 514-531.
- Latif, Hamdiah. (1992). *Perstauan Ulama Seluruh Aceh (PUSA): Its contributions to educational reforms in Aceh*. (Master of Arts), McGill University, Montreal, Canada, Ottawa, Canada.
- Maarif, Ahmad Syafii. (2012). *Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita*. Jakarta: Democracy Project.
- Mason, Jennifer. (2002). *Qualitative researching* (2nd ed.). London: SAGE Publications Ltd.
- Mawardi, A.I. 2003. The political backdrop of the enactment of the compilation of Islamic laws in Indonesia. In Salim, Arskal and Azra, Azyumardi (eds.), *Sharia and politics in modern Indonesia*. Singapore: ISEAS, 125-147.
- Miller, Michelle Ann. (2006). What's special about special autonomy in Aceh? In A. Reid (Ed.), *Verandah of violence: the background to the Aceh problem* (pp. 292-314). Singapore: NUS Press.
- Miller, Michelle Ann. (2009). *Rebellion and reform in Indonesia: Jakarta's security and autonomy policies in Aceh* (Vol. 10). New York: Routledge.
- Morris, Eric Eugene. (1983). *Islam and politics in Aceh: a study of center-periphery relations in Indonesia*. (Doctor), Cornell University, Southeast Asia Program.
- Morowitz, D. L. (1998). Democratization for Plural Society in Larry Diamond and Mars F Plattner. *Nationalism, Ethnic Conflict and Democratization*. Bandung: Institut Teknologi Bandung Press.
- Rahmawati, Arifah., Susilastuti, Dewi H., Mas' oed, Mohtar & Darwin, Muhadjir. (2018). The Negotiation of Political Identity and Rise of Social Citizenship: A Study of the Former Female Combatants in Aceh Since the Helsinki Peace Accord. *Humaniora*, 30 (1), 237-247. doi.org/10.22146/jh.v30i3.32653
- Reid, Anthony. (1979). *The blood of the people : Revolution and the end of traditional rule in northern Sumatra*. Kuala Lumpur, New York: Oxford University Press.
- Reid, Anthony. (2006). *Verandah of violence: the background to the Aceh problem*: Nus Press.
- Reid, Anthony. (2010). *Imperial Al Chemy, Nationalism, and Political Identity*. Cambridge University Press.
- Robinson, Kathryn. (2011). Sawerigading vs. sharia: Identities and political contestation in decentralised Indonesia. *Asian Journal of Social Science*, 39(2), 219-237.
- Rodriguez-Pose, Andrés, & Sandall, Richard. (2008). From identity to the economy: Analysing the evolution of the decentralisation discourse. *Environment*

- & *Planning C-Government & Policy*, 26(1), 54-72. doi: 10.1068/cav2
- Romli, R. (2019). Political Identity and Challenges for Democracy Consolidation in Indonesia. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 4(1), 78-98.
<https://doi.org/10.15294/ipsr.v4i1.17214>
- Salim, Arskal. (2004). 'Sharia from below' in Aceh (1930s–1960s): Islamic identity and the right to self-determination with comparative reference to the Moro Islamic Liberation Front (MILF). *Indonesia and the Malay World*, 32 (92), 80-99. doi: 10.1080/1363981042000263471
- Schröter, Susanne. (2010). Acehnese culture (s): plurality and homogeneity. *Aceh: History, Politics and Culture, Singapore: ISEAS*, 157-179.
- Schulte Nordholt, Henk, & Klinken, Geert Arend van. (2007). *Renegotiating boundaries : Local politics in post-Suharto Indonesia*. Leiden: KITLV Press.
- Schumann, O., 1999. Dilema Islam kontemporer: antara masyarakat madani dan Negara Islam. *Jurnal Pemikiran Islam Paramadina*, 1 (2)
- Sekretariat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. (2008). *Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan*. Banda Aceh.
- Shah, R., & Lopes Cardozo, M. (2014). Education and social change in post-conflict and post-disaster Aceh, Indonesia. *International Journal of Educational Development*, 38, 2-12. doi: 10.1016/j.ijedudev.2014.06.005
- Siegel, James T. (2000). *The rope of God*. Berkeley: University of Michigan Press.
- Suyanta, Sri. (2012). Idealitas kemandirian dayah. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 11(2), 16-37.